

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perempuan, dalam setiap segi kehidupan dirasa memiliki banyak problema yang menjadikannya menarik untuk pusat pembicaraan. Baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, bahkan sosial budaya, perempuan tak ubahnya sosok yang selalu menjadi pertimbangan, sekaligus objek dalam ketimpangan. Pasalnya selalu muncul perlakuan berbeda antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial masyarakat yang seolah dianggap relevan dan benar adanya. Namun, pada dasarnya asumsi ini pun tidak selalu harus memerlukan bukti dan pemecahan terhadap bagaimana memperlakukan perempuan dalam kapasitas yang seharusnya.

Mempertanyakan sosok perempuan yang baik dalam kehidupan keluarga ataupun rumah tangga, Berninghausen dan Kerstan (1992: 39) dalam Abdullah (1997: 6) terhadap penelitiannya pada sejumlah perempuan di daerah Klaten, Jawa Tengah, menyatakan bahwa perempuan haruslah menjadi seorang ibu yang baik, sekaligus istri yang patuh pada suami. Perempuan selebihnya harus mampu mendampingi dan mendukung keberhasilan suami, pandai bersikap dan berperilaku agar mendapatkan perhatian dari suami.

Abdullah (1997) menyebut perempuan sebagai sosok yang identik dengan dunia domestik. Peran yang dijalankan oleh perempuan tampak muncul dalam kapasitasnya sebagai seorang ibu sekaligus istri bagi suami sehingga hal ini menjadikan jangkauan perempuan menjadi semakin sempit. Adanya pandangan familialisme yang direproduksi dalam beragam diskursus, pada akhirnya turut menegaskan konsep peran perempuan yang hanya terhenti pada sektor lokal.

Bukan hanya secara sosial masyarakat, media dalam hal ini juga turut andil dalam merepresentasikan perempuan sebagai sosok komplementer dalam kehidupannya. Media mengkonstruksi perempuan sebagai seorang yang berkaitan dengan dunia dapur, anak, dan kecantikan. Di lain pihak, laki-laki dimunculkan sebagai sosok yang tegas dan kuat, yang dominan terhadap sektor publik dan global. Konsep ini oleh Berninghausen dan Kerstan; Soedarsono dan Muniatmo (ed) dalam Abdullah (1997: 7) dipandang sebagai sumber utama kebahagiaan dalam keluarga. Meskipun demikian, adanya pemisahan arena domestik dan

publik antara laki-laki dan perempuan ini seolah memaksa perempuan berada dalam subjek yang ter subordinasi. Hakikatnya, laki-laki sebagai penguasa area publik dinilai memiliki kelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Ini semakin memperkuat pandangan patriarki yang mengesankan adanya ketimpangan yang mengkonstruksi perempuan sebagai pihak yang terpinggirkan atas hak-hak persamaan yang seharusnya mampu mereka dapatkan. Berdasarkan pemikiran inilah, muncul upaya yang pembebasan terhadap posisi perempuan yang mengarah pada sebuah transformasi atas dikotomi *nature ke culture* (Abdullah, 1997:10).

Melihat posisi perempuan yang semakin terpinggirkan atas konstruksi sosial masyarakat, hal ini memunculkan sejumlah semangat untuk membebaskan perempuan atas keterpurukan yang diterimanya. Wujud perhatian terhadap posisi perempuan, sebenarnya dapat dilihat melalui sejumlah organisasi perempuan yang muncul sebelum kemerdekaan. Sebut saja Poetri Mardika, organisasi perempuan ini pertama kali terbentuk pada masa penjajahan Belanda tahun 1912 dan berorientasi pada perjuangan terhadap akses pendidikan perempuan serta reformasi perkawinan (Wieringa, 1998: 3). Pasca Poetri Mardika, Wieringa (1998: 3-4) mengidentifikasi sejumlah organisasi perempuan lain yang juga turut meramaikan perjuangan terhadap kesetaraan perempuan, seperti: Pawiyatan Wanito (1915), Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun—PIKAT (1917), Purborini (1917), Aisyiah (1917), Wanito Soesilo (1918), dan Wanito Hadi (1919). Namun, sejumlah organisasi perempuan ini dipandang oleh Soetjipto (2005: 22) sebagai organisasi yang masih bersifat kedaerahan dan hanya berpusat pada wilayah masing-masing organisasi.

Syahfitri Anita (2006: 3) dalam tulisannya berjudul Gerakan Perempuan: Kajian Teoritis, menyatakan bahwa wacana terhadap gerakan perempuan yang muncul sejak awal pada dasarnya adalah upaya yang bertujuan untuk memperjuangkan posisi perempuan. Pandangan ini lahir seiring dengan berkembangnya peran serta partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat, tak terkecuali dalam berbagai kebijakan publik yang ada. Hal ini semakin menguatkan sejumlah upaya dalam menciptakan ruang gerak tersendiri bagi perempuan guna memperjuangkan kesetaraannya, baik itu secara individual, maupun secara kolektif dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan secara nyata adalah melalui pemberdayaan perempuan. Konsep pembebasan dan pemberdayaan perempuan dari keterbelakangan ini

tidak harus mengkultuskan bagaimana perempuan dianggap lebih tinggi bahkan sangat dimuliakan dalam posisinya. Ruslan (2010: 80) memandang upaya pemberdayaan perempuan sebagai proses yang menjadikan perempuan untuk mampu menentukan pilihannya secara mandiri dan bijaksana. Konsep ini menawarkan titik terang terhadap posisi dan peran sosial perempuan yang setara dengan laki-laki, terbebas dari kemiskinan, kebodohan, serta sejumlah faktor yang mampu menghambat pengembangan diri para perempuan.

Bentuk pemberdayaan terhadap perempuan tentu harus dimaknai sebagai usaha untuk memperbaiki fungsi dan kemampuan perempuan agar dapat bersaing dengan laki-laki. Bersaing tidak dalam artian untuk memperoleh kemenangan atas laki-laki, melainkan bersaing guna memperoleh kesetaraan posisi terhadap laki-laki dalam kehidupan sosial. Berkaitan dengan hal ini, secara rasional bentuk pemberdayaan yang mampu membebaskan perempuan dalam keterkungkungan dan subordinasi, ini mengarah pada sebuah upaya pemberdayaan dalam setiap bidang yang mampu memberikan semangat perjuangan serta kemajuan pada diri perempuan.

Bertolak dari pemikiran sederhana di atas, salah satu bentuk pemberdayaan perempuan yang tercermin dalam wadah organisasi sosial perempuan di masyarakat adalah PKK. PKK atau Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang muncul melalui Seminar Ekonomi di Bogor pada tahun 1957. Program ini merupakan media yang digunakan oleh pemerintah untuk menyalurkan program-program bagi para perempuan di tingkat masyarakat bawah, khususnya di pedesaan maupun di perkotaan. Dalam hal ini, adanya kekuasaan negara yang disampaikan kepada para perempuan berkenaan dengan sejumlah aspek, seperti: sosial, budaya, ideologi, ekonomi, dan politik terhadap wilayah pengaruh yang menjadi tujuannya (Suryakusuma, 2011: 27).

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Erwita Dewi, Syahmardi Yacob, Ade Octavia, H. M. Jamal S., dan Rike Setiawati selaku Staf Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Jambi, pentingnya peran PKK adalah memberikan motivasi dan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan. Penelitian yang secara khusus dilakukan di Kota Jambi tersebut dimuat dalam Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Nomor 52 Tahun 2012 (Dewi, *et al*, 2012). Dengan menggunakan metode *experiential learning* (pembelajaran berdasarkan pengalaman), penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2012: 81) merujuk pada pemberian materi tentang

konsep motivasi dan pelatihan kewirausahaan yang ditujukan secara khusus bagi perempuan sebagai anggota sekaligus tim penggerak PKK di Kelurahan Rawa Sari.

Penelitian di atas didasari atas tujuan organisasi PKK dalam memberikan kesejahteraan kepada anggota dan masyarakat, terutama di lingkup keluarga, dimana perempuan dalam tinjauan khususnya merupakan kaum yang berhak untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik bersama pemerintah, maupun non pemerintah. Perempuan dalam kehidupan masyarakat perlu mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang mandiri. Perempuan diyakini perlu berinvestasi dan membangun sumber dayanya masing-masing, mengingat posisi perempuan sebenarnya sangat mulai dan terhormat sehingga sangat perlu ketika harus menjawab kebutuhan bangsa dengan mempersiapkan sumber dayanya untuk masa depan yang lebih baik (Dewi, *et al*, 2012). Maka dari itu, sebuah titik terang yang menarik untuk dibahas dalam hal ini adalah ketika mengaitkan keberadaan PKK dengan aspek pemberdayaan dan kesetaraan gender yang berusaha diusungnya.

PKK lebih jauh seharusnya mampu dimaknai sebagai semangat solidaritas dan keadilan bagi perempuan. Dengan menitikberatkan konsentrasi pada kehidupan keluarga dan rumah tangga, PKK seharusnya diyakini mampu memberikan semangat keharmonisan, keselarasan, serta keseimbangan dalam keluarga (Dewi, *et al*, 2012). Dalam kondisi ini pun, PKK memegang kontribusi mengenai bagaimana perempuan dapat diberdayakan, menjunjung tinggi adanya kesetaraan sekaligus keseimbangan dalam peran yang dijalankan perempuan dan laki-laki, tetapi tetap berperan kuat dalam memberikan kasih sayang dan menjaga keutuhan keluarga.

Penelitian mengenai PKK selanjutnya dilakukan oleh Radika Wahyu Setyoaji (2012) yang berjudul Dampak Program Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Dusun Sosoran, Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa PKK memang berdampak bahkan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Salah satu upaya peningkatan ekonomi yang dapat dilihat dalam penelitian ini adalah adanya beberapa kegiatan pelatihan keterampilan, seperti pembuatan kerupuk, molen pisang, serta mie basah, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pendapatan. Lebih jauh, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dampak

program PKK terhadap peningkatan ekonomi keluarga di Dusun Sosoran adalah adanya kenaikan tingkat penghasilan masyarakat—responden penelitian—yang mencapai 4,77%.

Gerakan PKK dikemas sebagai salah satu gerakan nasional yang bertujuan untuk mendukung program pembangunan. Adanya Tim Penggerak di dalam PKK, selain berperan untuk menjalankan aktivitas dan kegiatan di dalam PKK, tim ini secara nyata dianggap sebagai mitra pemerintah dalam kapasitas organisasi kemasyarakatan, yang mana berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak demi terlaksananya program PKK (Tim Penggerak PKK, 2010: I-7). Secara tidak langsung, konsep PKK telah mendukung adanya aspek politik sehingga PKK dapat dikategorikan sebagai gerakan sekaligus organisasi kemasyarakatan yang sebenarnya berbasis politik. Asumsinya, muncul muatan politik tertentu yang melibatkan adanya upaya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa PKK muncul berdasarkan konsep keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Tujuan PKK secara khusus adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Tim Penggerak PKK Pusat, 2010: I-7). Julia Suryakusuma (1982: 8; 2011: 27) memandang keluarga sebagai pendukung utama dalam proses pembentukan masyarakat dan keutuhan negara. Dalam hal ini, terdapat tiga faktor yang menjadikan keluarga menjadi aspek pendukung proses pembentukan masyarakat, yakni: 1) keluarga sebagai satuan ekonomi, reproduksi, dan media konsumsi; 2) keluarga merupakan satuan biososial, hubungan biologis ibu-ayah-anak serta konstruksi sosial; 3) keluarga adalah tempat pembentukan ideologi yang berkaitan dengan sistem, nilai, keyakinan, agama, budaya, dan lain sebagainya.

Fakta bahwa PKK mengusung visi sekaligus esensi besar dalam upaya pemberdayaan perempuan, terutama di lingkungan keluarga, diperluas melalui konsep pendidikan, pembinaan, serta pelatihan yang diimplementasikan ke dalam sejumlah program. Namun, secara konkret pelaksanaan program PKK nyatanya masih belum dapat dikatakan maksimal. Bagaimana kemudian masyarakat masih saja memaknai PKK hanya sebatas perkumpulan ibu-ibu dan pertemuan rutin arisan sehingga tak jarang dari mereka—ibu-ibu anggota PKK—memanfaatkannya sebagai ajang penonjolan identitas serta budaya konsumerisme di lingkungan masyarakat.

Pemahaman di atas tentunya mengindikasikan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai apa makna dari PKK. Kesetaraan gender yang seharusnya mampu diwujudkan dalam organisasi PKK pada akhirnya kurang begitu dipahami oleh para perempuan. Boleh jadi konteks PKK itu sendiri justru mematikan bentuk pemberdayaan yang pada awalnya disuarakan sebagai sebuah semangat kesetaraan gender bagi perempuan di masyarakat. Sebut saja ketika sejumlah pengurus atau tim penggerak PKK di tingkat kelurahan, beberapa di antaranya berasal dari istri para perangkat kelurahan. Begitu pula dengan fenomena PKK yang terjadi di tingkat atas dan bawahnya. Dalam hal ini, orang-orang yang aktif dalam organisasi PKK secara tidak langsung berasal dari kuasa ataupun jabatan yang dijalankan oleh laki-laki—suami—dalam tingkat pemerintahan sehingga secara tidak langsung, para perempuan—istri—seakan memiliki posisi terberi atas kuasa lelaki dalam struktur pemerintahan. Indikasinya, PKK justru muncul dan identik dengan konsep patriarki yang tak ubahnya menegaskan kuasa laki-laki atas perempuan dalam segala sektor.

Pemahaman sosial mengenai posisi PKK di atas secara tidak langsung terhenti dalam permasalahan PKK sebagai sebuah konstruksi sosial yang nyatanya kurang menguntungkan posisi perempuan di masyarakat. Sadar ataupun tidak, perempuan terus terkonstruksi dalam posisi subordinat atas kuasa laki-laki. Adanya konstruksi sosial ini diyakini sebagai bagian dari proses komunikasi serta pemahaman anggota PKK, secara khusus, dan masyarakat pada umumnya mengenai bagaimana PKK berjalan dalam setiap perilaku komunikasinya.

Thomas Aquinas Gutama (2010) melakukan penelitian tentang studi peran komunikasi dalam organisasi PKK di Desa Ngringo dan Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa proses komunikasi nyatanya sangat berperan dalam sebuah organisasi tak terkecuali dalam organisasi PKK. Adanya perubahan ataupun keputusan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKK pada dasarnya harus dikomunikasikan kepada anggota. Namun, dalam praktiknya, komunikasi yang dilakukan di dalam organisasi PKK ini mengalami sejumlah hambatan sejak pola komunikasi di PKK dibentuk dalam strategi *top-down*. Selain itu, ditemukan kesimpulan pula bahwa adanya budaya organisasi nyata kurang dirasakan dalam kegiatan PKK.

Penelitian Gutama (2010) lebih jauh merujuk pada bentuk komunikasi organisasi. Penerapan komunikasi serta iklim komunikasi dirasa menjadi faktor penting guna membentuk

pola komunikasi yang baik dan efektif dalam sebuah organisasi. Di lain pihak, bagaimana konsep identitas dikonstruksi melalui peran sosial perempuan sebagai wujud kesetaraan gender nyatanya kurang ditonjolkan. Bentuk interaksi dan hubungan secara personal antar anggota yang kemudian dibangun dalam komunikasi yang dilakukan kurang dibahas secara lebih jauh. Untuk itu, penelitian ini berupaya mencari sisi lain Gerakan PKK tentang bagaimana proses komunikasi di dalam PKK berkaitan dengan pembentukan *gender identity* sebagai sebuah konstruksi sosial, yakni melalui pola komunikasi perempuan di dalam Gerakan PKK. Dengan asumsi bahwa adanya konstruksi identitas gender yang dibentuk dalam pola komunikasi perempuan di PKK ini nyata menjadi aspek penting yang harus dibahas secara lebih detail, guna menjelaskan posisi perempuan yang seharusnya mampu memahami peran sosialnya melalui wujud kesetaraan dan pemberdayaan yang sesungguhnya.

Berkenaan dengan aspek komunikasi, adanya pola komunikasi pada dasarnya memungkinkan terjadinya sebuah kontak dan interaksi yang terjalin melalui hubungan antara individu sebagai subjek komunikasi. Dalam hal ini, pola komunikasi berkaitan dengan batasan nilai dan norma yang digunakan dalam menjalin interaksi sosial antar individu. Adanya norma dan nilai yang diyakini sebagai bagian dari konstruksi sosial budaya masyarakat pada akhirnya akan membentuk sebuah rujukan tentang cara seorang individu berkomunikasi. Lebih jelas, pola komunikasi yang terjadi pada individu ini diidentifikasi oleh Nuruddin (2000: 21) dalam Suryandari (2008: 15) ke dalam lima jenis pola komunikasi, yaitu: pola komunikasi antar pribadi; pola komunikasi pada kelompok kecil; pola komunikasi publik; pola komunikasi organisasi; dan pola komunikasi massa. Terkhusus dalam penelitian ini, konteks pola komunikasi yang mungkin relevan dengan rumusan permasalahan adalah terkait dengan pola komunikasi organisasi sekaligus pola komunikasi antar pribadi di dalam sebuah organisasi.

PKK sebagai salah satu bentuk organisasi dan gerakan perempuan Indonesia menjadi fenomena menarik karena konstruksi gender yang mampu dimunculkan di dalamnya. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai kesetaraan bagi perempuan melalui pembangunan nyatanya menjadi sebuah dilema atas peran serta perempuan dalam PKK yang masih menunjukkan posisi subordinat dibandingkan laki-laki. Dalam lingkarannya, PKK sebenarnya muncul sebagai sebuah organisasi sosial yang masih memiliki nilai positif dan semangat kesetaraan bagi perempuan. Namun, pada akhirnya semangat ini tidak terlihat secara langsung

dan justru menegaskan bagaimana dominasi laki-laki sebagai penentu kebijakan atas segala kegiatan PKK yang diimplementasikan bagi perempuan. Lebih jelas, munculnya bentuk identitas dan peran gender dalam PKK pun boleh dikata mengarah pada “ibuisme” yang dipahami sebagai konstruksi sosial keperempuanan wanita Indonesia (Suryakusuma, 2011), dimana perempuan dikonsepkan sebagai sosok *dualisme satu tubuh* lengkap dengan dua beban yang harus ditanggung bersamaan, yakni sebagai istri sekaligus ibu yang baik, yang mampu mengelola rumah tangga dengan seimbang sesuai dengan 10 program pokok PKK yang telah digariskan.

Muncul adanya *stereotyping*, dimana Julia Suryakusuma (2011) menyebut PKK sebagai organisasi penghubung antara kekuasaan negara dengan aspek sosial, budaya, ideologi, politik, serta ekonomi, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Adanya konstruksi sosial mengenai perempuan diungkapkan sebagai konsep yang menjadi perantara ataupun penghubung hegemoni negara terhadap setiap sektor lingkungan. Konteks ini menegaskan adanya paham paternalistik yang memang masih melekat dalam setiap bidang masyarakat, dan PKK dalam hal ini dianggap sebagai organisasi perempuan masa Orde Baru yang mengandung maksud khusus terhadap kehidupan masyarakat. Lebih jauh, kritik Julia Suryakusuma terhadap PKK mengarah pada ideologi patriarki yang sebenarnya telah melekat di dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Sebut saja ketika dalam sebuah keluarga, muncul sebutan bahwa laki-laki sebagai Bapak yang menjadi sumber kekuasaan terbesar, sedangkan perempuan dikonstruksi sebatas pendukung dengan mengambil posisi yang ter subordinasi atas kuasa yang melekat pada laki-laki—Bapak.

PKK bersama Dharma Wanita disebut sebagai salah satu pelegitimasi ideologi “ibuisme negara” terhadap para perempuan Indonesia. Terkhusus dalam konteks perempuan di area pedesaan, ideologi ini mengilhami sejumlah retorika dan program pemerintah tentang konsep gender negara, yakni konstruksi sosial keperempuanan di Indonesia (Suryakusuma, 2012: 177-178). Lebih jelas, tiga hal yang digarisbawahi oleh Julia Suryakusuma tentang konstruksi keperempuanan di Indonesia ini adalah pandangan Mies (1982: 180) mengenai *housewifization* (gender dan produk kapitalisme); Djajadiningrat (1987) tentang konsep ibuisme sebagai dampak kultural masyarakat; serta *domestication* yang mengarah pada penyebaran ideologi gender terhadap perempuan (Suryakusuma, 2012: 178-185).



Budaya patriarki terhadap konstruksi sosial perempuan di dalam PKK, salah satunya dapat dilihat melalui keberadaan PKK yang erat kaitannya dengan pemerintah juga dapat dimunculkan melalui keberlangsungan PKK yang sangat tergantung dengan kebutuhan birokratis Departemen Dalam Negeri—Kementerian Dalam Negeri. PKK secara langsung dibina oleh “laki-laki” yang pada akhirnya mencetak anggota-anggota yang patuh pada garis ideologi di dalam PKK. Terutama di dalam PKK tingkat desa, para anggota yang aktif di dalam PKK ini pada umumnya berasal dari para perempuan golongan menengah ke atas yang mana tidak memiliki kebutuhan mendesak layaknya petani miskin yang hidup sebagai bagian terbesar di dalam kependudukan desa (Suryakusuma, 2011: 32). Konsep inilah yang kemudian semakin mengukuhkan tentang bagaimana perempuan semakin ter subordinasi pada ranah domestik dan terbelenggu dalam ideologi patriarki. Sejumlah jabatan penting di dalam PKK hanya bersifat simbolis karena dipimpin oleh istri para pejabat—misalnya istri lurah atau kepala desa—sehingga beberapa posisi inti dalam pengurus ataupun tim penggerak PKK ini seyogyanya merupakan posisi pemberian atas dasar jabatan sang suami sehingga dengan kata lain, adanya dominasi sektor publik oleh suami atas istri pada akhirnya tidak terelakkan lagi.

Analogi sederhana bahwa PKK dalam posisinya adalah bagaikan tubuh magnet dilengkapi dengan dua kutub yang berbeda dan berlawanan. Di satu sisi, PKK mengusung format dan visi mulia untuk upaya pembebasan perempuan dalam wujud pemberdayaan. Sisi positif PKK dapat dilihat pada beberapa hasil penelitian terdahulu bahwa PKK mampu memotivasi sekaligus memberikan pelatihan kewirausahaan kepada perempuan agar dapat menjadi individu yang mandiri dan berkualitas. Akan tetapi, di lain pihak sejumlah kecenderungan kegiatan dalam PKK justru dimaknai hanya sebagai kegiatan rutin formalitas semata sehingga hal ini turut mempertanyakan bagaimana sebenarnya bentuk implementasi pemberdayaan serta keberadaan perempuan terhadap peran sosialnya di dalam masyarakat.

Dilema PKK di dalam masyarakat pada akhirnya menjadikan perempuan menjadi kurang peka terhadap identitas gender yang sebenarnya mampu dimunculkan dan dikonstruksi melalui PKK. Dalam hal ini, adanya konstruksi identitas gender dalam Gerakan PKK dapat terbentuk melalui proses komunikasi yang dijalankan oleh Gerakan PKK itu sendiri. Asumsi terkait muncul ketika penyampaian pesan atas rangsangan oleh pengurus PKK sebagai komunikator terhadap anggota PKK sebagai komunikan, akan menciptakan pemahaman

bersama tentang bagaimana sebuah identitas terbentuk sesuai maksud dan tujuan komunikasi yang disampaikan. Pembentukan ini akan dibangun melalui interaksi individu serta proses penerimaan pesan informasi yang terjadi, baik itu secara personal dalam lingkup pribadi, maupun secara sosial dalam lingkup kelompok ataupun organisasi. Batasan inilah yang kemudian akan menghubungkan konsep komunikasi, yang pada dasarnya sangat berperan dalam pembentukan identitas gender di dalam PKK.

Berbicara mengenai gender, konsep gender di Indonesia bermula dari pernyataan tegas dalam persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara (baik laki-laki maupun perempuan), tepatnya dalam Garis Besar Haluan Negara 1993, dimana diamanatkan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan. Hal ini diperkuat dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tepatnya dalam UU No. 7 tahun 1984 (Soetjipto, 2005: 1). Akan tetapi, Soetjipto (2005: 1-2) menambahkan dalam kenyataannya perempuan dapat dikatakan mengalami ketertinggalan bahkan ketidakberuntungan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gender menurut Hermawati (2007: 21), pada dasarnya dipahami dan dianalisis guna mengetahui perbedaan alami yang mungkin cenderung menimbulkan diskriminasi dan penderitaan bagi perempuan. Gender merupakan atribut sosial yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan. Mansour Fakih (2004: 12) memberikan batasan mengenai pandangan sosial masyarakat terhadap istilah gender yang berkenaan erat dengan posisi dan peran yang diberikan bagi perempuan dalam kehidupan sosial, dimana konsep gender yang bersifat dinamis dan muncul berdasarkan pandangan dan konstruksi sosial yang dibentuk di dalam masyarakat.

Munculnya perlakuan tidak seimbang terhadap perempuan dinyatakan oleh Nugroho (2008: 105) sebagai bagian dari konstruksi budaya. Sekalipun konsep perempuan dinyatakan sangat baik, tetapi dalam kenyataannya, perempuan tetap berada di bawah dominasi laki-laki atas pemahaman sejarah yang telah ada. Munculnya aspek konstruksi budaya sangat mempengaruhi kedudukan perempuan dalam menjalankan peran sosialnya di masyarakat Indonesia, dan gender sebenarnya mampu menjadi alternatif dalam menjawab konsep kesetaraan yang diimpikan oleh semua perempuan (Sudarta, 1998: 2). Adanya

kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan melahirkan suatu hubungan kedudukan dan peranan yang dinamis di antara keduanya. Dalam hal ini, terdapat persamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang.

Adanya ketidakadilan gender (*gender inequalities*) di pihak lain dirasa mampu memunculkan beberapa perlakuan berbeda terhadap antara perempuan dan laki-laki, dan dalam hal ini, tentunya perempuan berada dalam posisi yang kurang begitu diuntungkan. Munculnya ketidakadilan gender oleh Fakih (2004: 12-13), pada akhirnya dilihat dari beberapa kecenderungan dalam memperlakukan perempuan, antara lain seperti: marginalisasi (peminggiran), subordinasi, stereotif (label negatif), kekerasan, dan pemberian beban kerja berlebih. Ketimpangan gender muncul pada bentuk analisis kategori gender terhadap perempuan. Dalam hal ini, muncul istilah *gender structure*, *gender identity*, dan *gender symbolism* (Harding, 1986 dalam Utari, 2007: 2). Ketiga kategori ini juga dipandang oleh Cockburn dan Ormrod (1993) dalam Utari (2007: 2) sebagai rumusan kategori yang sangat berpengaruh terhadap strategi perempuan dalam memecahkan masalah gender yang menimpanya. Terkhusus pada konsep identitas gender (*gender identity*), hal ini dirasa menjadi salah satu permasalahan utama yang dapat dikaitkan dengan fenomena PKK.

Munculnya gender sebagai sebuah identitas dalam kaitannya dengan komunikasi dapat diidentifikasi melalui adanya sosialisasi atas nilai-nilai gender yang disebarkan. Dalam hal ini, muncul istilah *gender socialization* dimana ini merupakan proses yang memungkinkan seorang individu berpikir dan belajar terhadap nilai serta norma yang ada di dalam lingkungan sosialnya. Misalnya saja ketika seorang laki-laki maupun perempuan bersikap dan bertindak sesuai dengan peran sosialnya. Adanya sosialisasi gender dipandang oleh Carolyn Corrado (2008) berpengaruh terhadap cara individu dalam mengembangkan identitas gendernya, mendefinisikan diri dalam kapasitas pemisahan (dikotomi), apakah ia seorang laki-laki ataupun perempuan. Dalam konteks ini, *gender socialization* dapat dikatakan sebagai proses yang mengharuskan setiap individu memaknai dan mengkonstruksi dirinya sesuai dengan posisi seks (jenis kelamin) terhadap bagaimana kecenderungan sikap sekaligus tindakan yang dilakukan di dalam masyarakat.

Berkenaan dengan fenomena yang terjadi di PKK, perempuan ketika memahami posisi, fungsi, dan peran sosialnya di masyarakat, ini berpengaruh terhadap bagaimana mereka mengembangkan identitas gender yang dimiliki. Dalam pemahaman ini, apakah perempuan memposisikan diri mereka subjek (*I*) ataukah sebagai objek (*Me*) dirasa sangat menentukan sudut pandang para perempuan dalam memahami serta membentuk identitas gender yang ada. Konteks ini juga mengarah pada adanya interaksi yang dilakukan antarperempuan, dimana Gerakan PKK secara tidak langsung muncul sebagai sebuah wadah komunikasi terutama bagi perempuan. Adanya konsep *gender socialization* sangat memungkinkan para perempuan ini meyakini sekaligus terikat dengan nilai dan norma yang dibangun di dalam masyarakat melalui PKK. Dengan demikian, PKK boleh jadi muncul sebagai gerakan yang turut melahirkan wacana tentang gender, dalam mengkonstruksi posisi perempuan untuk diharuskan menjadi sosok yang ideal sesuai dengan apa yang diamini oleh masyarakat.

Munculnya berbagai organisasi dan pergerakan perempuan dipandang oleh Martyn (2005: 61) sebagai pemahaman identitas gender yang telah melekat pada sejumlah organisasi ataupun pergerakan perempuan terkait. Konsep ini mengidentifikasikan bahwa adanya identitas sebuah organisasi perempuan Indonesia dapat direpresentasikan melalui perbedaan pemahaman keperempuanan yang ada, terutama pada isu-isu serta konten gender mampu dianalisis serta menjadi pokok bahasan dalam aktivitas organisasi. Untuk kasus PKK, ini merupakan salah satu gerakan keperempuanan yang bersifat formal. Dalam posisinya sebagai organisasi, pola aliran informasi di dalam PKK sangat memungkinkan adanya strategi tertentu, dimana strategi penyaluran pesan ini akan bergerak dalam kapasitas aturan tertentu yang diyakini. Selain itu, muncul pula konteks iklim serta budaya organisasi yang akan mempengaruhi bagaimana para anggota di dalam organisasi tersebut memahami serta meyakini seluruh pesan-pesan yang disampaikan di dalam PKK.

Pengurus PKK, dalam posisinya merupakan komunikator yang bertugas untuk menyampaikan serta memproduksi pesan di dalam organisasi PKK. Di samping itu, posisi komunikan yang menerima pesan mengarah pada para anggota sebagai sasaran dari komunikasi. Adanya pola komunikasi dalam organisasi dapat bergerak secara *top-down*, *bottom-up*, maupun secara horizontal. Berbicara tentang bagaimana identitas gender dikonstruksi di dalam PKK, hal ini berkenaan dengan adanya produksi pesan yang dilakukan oleh komunikator—pengurus PKK—terhadap para komunikan—anggota PKK. Boleh dikata,

konsep *gender identity* dipengaruhi oleh adanya *gender socialization* yang pada akhirnya memungkinkan setiap pengurus untuk menanamkan nilai-nilai gender tertentu di dalam pesan informasi yang disampaikan kepada anggota PKK. Mengingat, proses penyampaian pesan oleh pengurus pada dasarnya mampu mengubah cara pandang dan persetujuan atas pesan yang dihasilkan, untuk kemudian diinterpretasi serta dipahami dengan baik.

Proses penyampaian pesan oleh komunikator dinyatakan berkaitan dengan pandangan konstruktif, dimana individu merupakan sumber pesan yang erat kaitannya dengan refleksi kesadaran yang dimiliki. Dalam hal ini, aspek kognitif dianggap menjadi faktor penting dalam proses produksi pesan. Lebih jauh, muncul pula aspek kesadaran dan adaptasi individu yang berkaitan dengan aspek subjektivitas, afektif, serta hubungan terhadap konteks komunikasi (Burleson dan Caplan, 1997: 249 dalam Miller, 2005: 108). Kembali dalam konteks PKK, pengurus dipandang sebagai individu yang menjadi sumber pesan (*person-centered communication*), dimana pihaknya akan sangat berperan dalam segala aspek penyampaian pesan, mulai dari penginformasian, sampai pada persuasi serta manajemen konflik. Asumsinya, pengurus sebagai komunikator akan menjadi tokoh sentral dalam pembentukan identitas sosial dalam organisasi, tak terkecuali dalam kaitannya dengan substansi gender dan pemberdayaan perempuan di dalam PKK.

Konstruksi identitas gender di dalam PKK, dalam kaitannya dengan pola komunikasi juga mengarah pada penerimaan pesan oleh anggota PKK. Dalam konteks ini, para anggota sebagai sasaran komunikasi adalah individu-individu dengan peran kognisi masing-masing yang kemudian digunakan untuk memproses setiap informasi yang diterimanya. Lebih lanjut, pesan informasi disampaikan kepada anggota PKK boleh dikata merujuk pada konsep persuasi, yang pada akhirnya tidak terlepas dari bagaimana pesan tersebut dirancang sedemikian rupa sesuai dengan sumber informasi guna mengubah ataupun mempengaruhi pemikiran serta perilaku dari anggota.

Berangkat dari pemahaman konsep komunikasi di atas, pola komunikasi dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan antara pengurus dan anggota di PKK dirasa memiliki peran tersendiri dalam mengkonstruksi identitas gender di PKK. Ketika sebagian besar penelitian terdahulu nyatanya lebih mengarah pada konteks sosiologis dan substansi pemberdayaan terhadap perempuan, maka dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mencari sisi lain tentang aspek komunikasi yang juga berpengaruh terhadap pemberdayaan

perempuan dalam identitas gender yang dikonstruksi di PKK. Lebih lanjut, mengenai arah pembentukan identitas gender pada organisasi PKK ini, apakah pada akhirnya mampu memperkuat dan memberdayakan perempuan dalam peran sosialnya, ataukah justru memperlemah posisi tawar perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Dua lokasi penelitian secara khusus dipilih oleh peneliti sebagai pilihan kasus penelitian guna membatasi rumusan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, penelitian dirancang ke dalam strategi studi kasus, mengingat fenomena dan permasalahan yang akan dianalisis ini muncul sebagai keunikan tersendiri pada sejumlah PKK, terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan. Dengan kata lain, studi kasus pada dua lokasi sengaja dipilih oleh peneliti tidak untuk membuat generalisasi pada semua Gerakan PKK di Indonesia, melainkan lebih untuk menonjolkan permasalahan yang dianalisis, terutama pada dua lokasi yang dinyatakan memiliki karakteristik tertentu yang berbeda.

Dua lokasi penelitian yang digunakan adalah Gerakan PKK di Kelurahan Kenep dan Gerakan PKK di Kelurahan Jetis. Dalam memilih kedua lokasi ini, peneliti memiliki sejumlah pertimbangan tertentu. Kelurahan Kenep dipilih menjadi lokasi pertama karena potensi kewirausahaan dan ekonomi kreatif setempat yang cukup baik. Kelurahan ini merupakan salah satu lokasi desa industri kreatif di Kabupaten Sukoharjo karena banyak menghasilkan produksi kewirausahaan seperti batik tulis, batik cap, makanan tradisional, dan jamu tradisional. Selanjutnya, Kelurahan Jetis menjadi kelurahan kedua yang menjadi lokasi penelitian karena tingkat sosial budaya industri perkotaannya yang tinggi. Salah satunya dapat dilihat dari lokasi kelurahan yang dekat dengan pusat kota, banyaknya fasilitas umum di bidang pendidikan, serta keberadaan sebuah pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara sebagai salah satu pusat perekonomian Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan penjelasan di atas, sebagai arahan dalam penelitian ini, maka peneliti memilih judul **POLA KOMUNIKASI PEREMPUAN DALAM MENGONSTRUKSI IDENTITAS GENDER PADA GERAKAN PKK (Studi Kasus Tentang Produksi dan Penerimaan Pesan dalam Mengkonstruksi Identitas Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Gerakan PKK di Kelurahan Kenep dan Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo)**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan secara umum dalam penelitian ini adalah bagaimana pola komunikasi perempuan dalam mengkonstruksi identitas gender dan pemberdayaan perempuan pada Gerakan PKK di Kelurahan Kenep dan Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, secara khusus penelitian ini juga merumuskan sejumlah permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman perspektif *I and Me* para pengurus dan anggota PKK dalam mengkonstruksi identitas gender pada Gerakan PKK di Kelurahan Kenep dan Kelurahan Jetis?
2. Bagaimana pola komunikasi para pengurus sebagai komunikator pesan dalam mengkonstruksi identitas gender pada Gerakan PKK di Kelurahan Kenep dan Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimana pola komunikasi para anggota sebagai komunikan pesan dalam mengkonstruksi identitas gender pada Gerakan PKK di Kelurahan Kenep dan Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo?
4. Bagaimana kaitan antara pola komunikasi perempuan, melalui pengurus sebagai komunikator pesan dan anggota sebagai komunikan pesan, dalam mengkonstruksi identitas gender dengan aspek pemberdayaan perempuan pada Gerakan PKK di Kelurahan Kenep dan Kelurahan Jetis?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi perempuan dalam mengkonstruksi identitas gender dan pemberdayaan perempuan pada Gerakan PKK di Kelurahan Kenep dan Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Lebih lanjut, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman perspektif *I and Me* para pengurus dan anggota PKK terhadap konstruksi identitas gender pada Gerakan PKK di Kelurahan Kenep dan Kelurahan Jetis.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis peran para pengurus PKK sebagai komunikator pesan dalam mengkonstruksi identitas gender pada Gerakan PKK di Kelurahan Kenep dan Kelurahan Jetis.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis peran para anggota PKK sebagai komunikan pesan dalam mengkonstruksi identitas gender pada Gerakan PKK di Kelurahan Kenep dan Kelurahan Jetis.
4. Menganalisis kaitan antara pola dan proses komunikasi perempuan melalui peran pengurus PKK sebagai komunikator pesan, serta peran anggota PKK sebagai komunikan pesan, dalam mengkonstruksi identitas gender pada Gerakan PKK di Kelurahan Kenep dan Kelurahan Jetis dengan aspek pemberdayaan perempuan, apakah melalui identitas gender yang terbentuk selanjutnya mampu memberdayakan perempuan ataukah justru memperlemah pemberdayaan perempuan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan mampu menjadi salah satu referensi dalam memperoleh serta menambah kajian teori komunikasi, terutama dalam konteks proses penyampaian pesan dan pola komunikasi yang dikaitkan dengan analisis gender sebagai bagian dari pembentukan identitas.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam sejumlah analisis mengenai fenomena sosial dan isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Gerakan PKK, baik bagi pengurus PKK maupun anggota PKK, guna mengembangkan berbagai kegiatan pelatihan untuk para anggota PKK sehingga mampu mewujudkan arah pemberdayaan perempuan yang lebih optimal.



